

RENCANA KERJA

RENJA



KECAMATAN TONRA
KABUPATEN BONE

TA. 2023

LAMPIRAN LXII

PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG RANCANGAN RENCANA

KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BONE TAHUN 2023

RENCANA KERJA
KECAMATAN TONRA
KABUPATEN BONE
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tonra Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan dari tahun ketahun, peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan pada Tahun 2023 mengoptimalkan Program dan Kegiatan yang telah berjalan dan mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja Tahun 2023 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Tonra, Dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan Pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan Program dan Kegiatan.

Rencana Kerja sebagai Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan Program/Kegiatan dalam satu Tahun dan sebagai acuan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023 dan untuk mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan Capaian tahun berjalan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2023 ini, maka diharapkan dapat dijadikan motifasi dan Pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bagi seluruh Aparat Kecamatan demi mencapai Visi dan Misi, Keberhasilan Renja ini tidak lepas dari Kerjasama, Integritas Moral dan dukungan semua Pihak termasuk peran serta Masyarakat.

Bulu-Bulu, 30 Juli 2022

CAMAT TONRA



ANDI SUPRIADI, SH
Pangkat : Pembina
Nip.19731030 200604 1 009

DAFTAR ISI	
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud Dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian	
Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Perangkat Daerah	41
3.3. Program dan Kegiatan	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	46
BAB V PENUTUP	53
LAMPIRAN	
1. Cascading Kinerja Renja Kecamatan TonraTahun 2023	
2. Rumusan Program, Kegiatan & Pendanaan Renja Tahun 2023 dan Prakiraan Maju	
Tahun 2024 (Cetakan SIPD) Kecamatan TonraKabupaten Bone	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. T.C.29. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah		
dan pencapaian restra s/d tahun 2022	12	
Tabel 2.2	Realisasi Keuangan Tahun 2020 - Tahun 2022 (Semester I)	
Kec. Tonra	20	
Tabel 2.3	Penjelasan Tolak Ukur Indikator Tabel T-C.30	24
Tabel 2.4. T.C.30. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tonra.....		21
Tabel 2.5. T.C.31. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023		29
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah beserta Program dan Kegiatan	
Tahun 2023 – Kecamatan Tonra Kab. Bone		43
Tabel4.1. T.C.33. Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Tonra		
Tahun 2023		45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terintegrasi secara nasional untuk pencapaian tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian tujuan dan cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia dijabarkan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disinergikan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di setiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

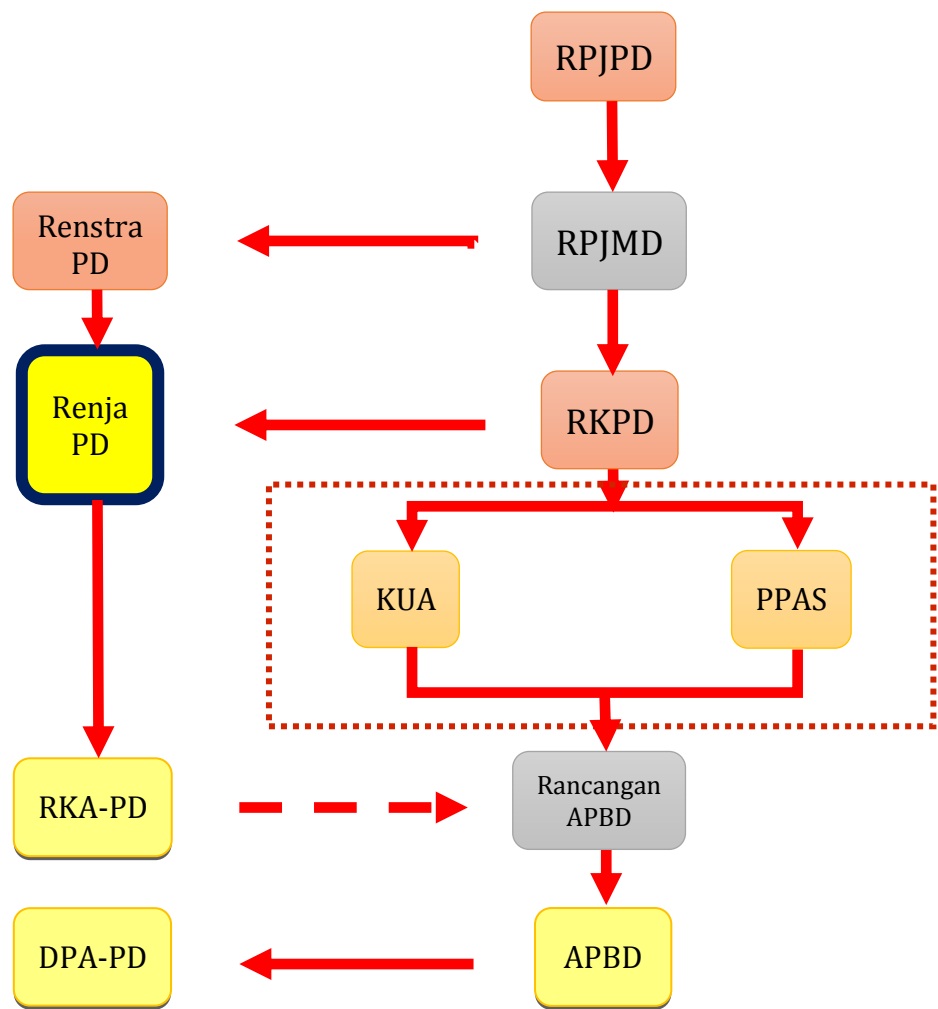
Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diwajibkan untuk memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik & Bersih (Good Governance & Clean Government), dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja (Perpres Nomor 29 Tahun 2014) dan Sistem Pengendalian Internal (PP No. 60 Tahun 2008) beserta Standar Pelayanan Minimal (PP No. 65 Tahun 2005), yang semuanya menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam implementasinya, dan juga sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Perpres Nomor 81 Tahun 2010).

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang memuat tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Salah satu dokumen Rencana Perangkat Daerah yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah menurut urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan. Selain itu, dalam renja perangkat daerah disajikan pula kelompok sasaran, lokasi, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Gambar 1.

Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya



Proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dilakukan setiap tahunnya secara simultan dan selaras dengan penyusunan RKPD (yang diproses dengan pendekatan *teknokratik, partisipatif, politis, top-down dan bottom up*, dengan substansi pendekatan yang bersifat *holistik-tematik, integratif, dan spasial*).

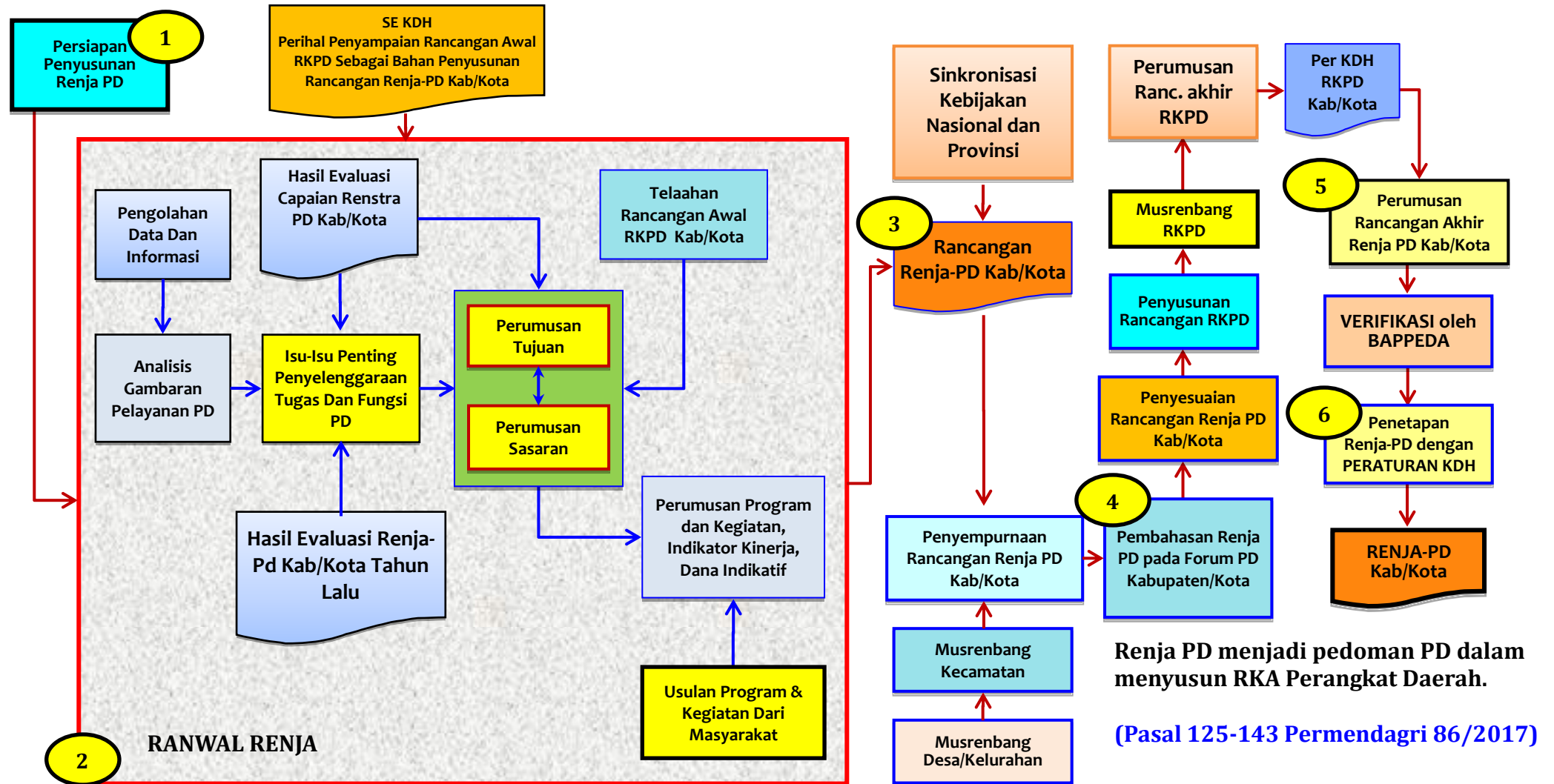
Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal yang kemudian menjadi rancangan Renja-PD. Selanjutnya, rancangan Renja ini disempurnakan melalui koordinasi dan sinergitas antar instansi pemerintah daerah dan partisipasi seluruh stakeholder yang terkait melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang di tiap tingkatan pemerintahan mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. Hasil Musrenbang tersebut kemudian ditindak lanjuti dalam perumusan rancangan akhir Renja-PD dalam Forum Perangkat Daerah yang terbagi menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja-PD merupakan hasil akhir dari seluruh tahapan penyusunan dengan memperhatikan keselarasan dan sinkronisasinya terhadap RKPD & RPJMD

Kabupaten, Renstra Perangkat Daerah, RKPD Provinsi, dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kementerian/Lembaga Pemerintah yang terkait.

Setelah melalui proses verifikasi oleh BAPPEDA dan finalisasi rancangan akhir, selanjutnya renja perangkat daerah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan peraturan kepala daerah tentang RKPD. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai pedoman untuk menetapkan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam proses penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah (RKA dan APBD) setiap tahun anggaran.

Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2. Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tonra Kab. Bone Tahun 2023 ini, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 486);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 590)
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314).
33. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 20)

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9);
39. Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 94)
40. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 41);
41. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 107).
42. Peraturan Bupati Bone Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Bone Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 34).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, maka setiap tahunnya diperlukan perencanaan strategi dan kebijakan pencapaian target kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Sebagai dokumen perencanaan kinerja tahunan, Rencana Kerja ini memuat strategi dan kebijakan beserta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Kecamatan Tonra Kab. Bone Tahun 2023 ini disusun dengan **maksud** sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan RKPD Kabupaten Bone Tahun 2023 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tonra Kab. Bone dalam pelaksanaan urusan Kewilayahan
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran (RKA/DPA-SKPD) Kecamatan Tonra Kab. Bone pada Tahun 2023.

Adapun **tujuan** penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tonra Kab. Bone Tahun 2023 ini, adalah:

1. Untuk menetapkan indikator beserta target capaian kinerja beserta pagu indikatif program dan kegiatan Kecamatan Tonra Kab. Bone yang akan dilaksanakan pada tahun 2023;
2. Untuk menetapkan tolak ukur keberhasilan kinerja Kecamatan Tonra Kab. Bone pada Tahun 2022 sesuai dengan Renstra Perubahan Periode Tahun 2018-2023.

Hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Tonra Tahun 2023 ini, nantinya diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kab. Bone.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Tonra Kab. Bone Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan ; Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Bab 2 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu ; Menyajikan uraian tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun sebelumnya dan capaian kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan, isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ; Memuat rumusan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran beserta Gambaran Umum Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ; Menyajikan Gambaran Rencana Kerja Perangkat Daerah secara rinci tentang Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran beserta Pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab 5 Penutup ; Menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta harapan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Tahun Perencanaan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

Evaluasi terhadap capaian rencana kerja tahun lalu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pencapaian target kinerja sasaran strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan TonraKab. Bone pada tahun sebelumnya, untuk selanjutnya dinilai hasil capaiankinerjanya dan dianalisis hambatan dan kendala yang ada guna perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi pada tahun-tahun berikutnya. Proses evaluasi ini dilakukan terhadap capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja dan Perjanjian Kinerja antara Inspektur Daerah Kab. Bone dengan Bupati Bone selaku pemberi amanah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone

2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah TahunLalu Dan Capaian Renstra*

Perangkat Daerah

Kajian terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Tahun 2023 ini berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2022), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah Periode Tahun 2018-2023. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Tonra hingga tahun 2021 mengacu pada Renstra Pokok (Sebelum Perubahan) Tahun 2018-2023, dan evaluasi renja tahun 2022 (proyeksi) mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2018-2023. Hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur Program dan Kegiatan yang mengacu pada PMDN Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kondisi tersebut menuntut adanya perubahan mendasar terkait indikator dan target kinerja yang disesuaikan dengan perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang disertai sub kegiatan, termasuk perbaikan dari aspek akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2021 oleh KemenPAN-RB. Perubahan ini mengakibatkan hasil evaluasi Renja hingga Tahun 2021 disajikan terpisah dengan evaluasi Renja Tahun 2022.

Hasil review terhadap realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Renja hingga tahun 2021 dan proyeksi capaian kinerja tahun 2022, selanjutnya menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, dengan

mempertimbangkan realisasi capaian kinerja program dan kegiatan, faktor-faktor penentu keberhasilan/kegagalannya serta implikasi yang timbul terhadap pencapaian target jangka menengah (Renstra). Dari hasil review tersebut, dapat ditetapkan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk peningkatan/perbaikan kinerja Perangkat Daerah ke depannya. Rekapitulasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan sesuai Renja dan Renstra Kecamatan Tonra Kab. Bone hingga tahun 2021 berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2021 dan proyeksicapaian kinerja hingga tahun 2022.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauhmana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dan hambatan / permasalahan yang dihadapi. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP).

Tahun 2021 merupakan tahun *Ketiga* dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Tonra (Renstra 2018-2023), yang Secara keseluruhan pada tahun anggaran 2021 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Tonra sebesar Rp. 9.328.199.081,- (Sembilan milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan puluh satu rupiah) yang merupakan belanja operasioanl yang terdiri dari belanja pegawai Rp. 8.900.161.081,- (Delapan Milyar Sembilan ratus juta seratus enam puluh satu ribu delapan pukuah satu rupiah), dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 428.038.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta tiga puluh delapan ribu rupiah). Dari Plafon Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 8.979.538.960,- (Delapan milyar Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta lima tarus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) atau mencapai 96,26 %, terdiri dari belanja pegawai Rp.8.610.588.960,- (Delapan milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) atau sekitar 96, 75% disebabkan karena terdapat beberapa pegawai yang pensiun, meninggal dunia dan berkurangnya tunjangan keluarga yang tidak dibayarkan sehingga tidak bisa mencapai realisasi 100%. Sedangkan belanja barang dan jasa yang terealisasi hanya sebesar 86,20% atau Rp. 368.950.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) disebabkan beberapa kegiatan tidak terlaksana 100% dikarenakan proses administari dan keterbatasan waktu dalam menyelesaikan administrasi serta adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tonra

tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Tonra. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Tonratahun berjalan (tahun 2022). Adapun gambaran selengkapnya, disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 2.1 T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Tonra dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Berdasarkan Permendagri 90
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN TONRA

PERMENDAGRI 90

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
												Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2		3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7						UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01					KECAMATAN											

7	01	01				PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	100 %	100%	100%	96,61 %	100%	100%	100%
7	01	01	2	01		<i>Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang tersusun (Dokumen)	1	2	2 Dokumen	2	100%	1	5	1,25 %
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang tersusun (Dokumen)	1	-	-	-	-	1	1	0,25 %
7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang tersusun (Dokumen)	1	-	-	-	-	1	1	0,25 %
7	01	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun (Dokumen)	1	-	-	-	-	1	1	0,25 %

7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realialisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan Capaian Kinerja yang tersusun (Dokumen)	4	5	5 Dokumen	5	100%	4	14	3,5%
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	96,75%	100%	100%	100%
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan beserta Tambahan Penghasilan Bulanan bagi ASN (Tahun))	110	1	1 Tahun	1	96,75%	1	3	0,75 %
7	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	61,07%	100%	100%	100%
7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dan Pengadaan Khusus Hari-Hari Tertentu sesuai rencana kebutuhan (Pegawai)	18	21	20 Pasang	20	61,07%	20	61	15,25 %

7	01	01	2	06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100%	100%	92,82%	100%	100%	100%
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (Paket)	1	1	1 Paket	1	100%	2	4	1 %
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai,Rapat dan Tamu sesuai rencana kebutuhan (Paket)	3	1	1 Paket	1	95,66%	3	5	1,25 %
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (Paket)	2	1	1 Paket	1	94,55%	2	4	1 %
7	01	01	2	06	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan (Paket)	3	24	36 Paket	36	100%	36	96	24 %
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (kegiatan)	12	300	450 kegiatan	450	86,46 %	18	768	192 %

7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%
7	01	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor sesuai rencana kebutuhan (Unit)	-	-	-	-	-	1	1	0%
7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubeleur Kantor sesuai rencana kebutuhan (Paket)	4	-	-	-	-	0	0	0%
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan (Unit)	3	3	-	-	-	3	6	1,5 %
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	91,63 %	100%	100%	100%
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Pembayaran Jasa Komunikasi Bulanan (Listrik dan Telepon/Wifi) sesuai rencana kebutuhan (Rekening)	12	24	36 Rekening	36	85,42 %	36	96	24 %

7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan perbulan untuk pelaksanaan administrasi perkantoran (Orang)	12	2	2 Orang	2	100%	12	16	4 %
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	97,86 %	100%	100%	100%
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan Kendaraan Dinas secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan (Unit)	4	5	4 unit	4	97,25 %	4	13	3,25 %
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung kantor sesuai rencana kebutuhan (Paket)	8	1	1 paket	1	100%	8	10	2,5 %
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sesuai rencana kebutuhan (Paket)	2	1	1 paket	1	100%	2	4	1 %
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7	01	02	2	01		<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (paket)	1	1	1 paket	1	100%	1	3	0,75 %
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	69,18 %	100%	100%	100%
7	01	03	2	01		<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	100%	100%	100%	100%	69,18 %	100%	100%	100%
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (dokumen)	1	7	2 dokumen	2	69,18 %	1	10	2,5 %
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	04	2	01		<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Operasional Tripika (kali)	36	36	36 Kali	36	100%	36	108	27 %
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	06	2	01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	06	2	01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah laporan hasil Evaluasi rancangan Peraturan Desa (Laporan)	0	11	11 laporan	11	100%	11	33	8,25 %
7	01	06	2	01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Desa dan Penyisihan PBB (laporan)	11	11	11 laporan	11	100%	11	33	8,25 %

Sumber Data: Renstra Perubahan 2018-2023 dan LKjIP 2021

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Tahun 2020 - Tahun 2022 (Semester I) Kec. Tonra

JENIS BELANJA	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022 (SEMESTER I)		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	8.762.598.714,-	8.511.590.616,-	97,14%	8.900.161.081,-	8.610.588.960,-	96,75%	8.486.018.950,-	4.089.449.408,-	48,19%
Belanja Barang dan Jasa	411.538.000,-	392.199.796,-	95,30 %	428.038.000,-	368.950.000,-	86,20 %	378.966.000,-	189.483.000,-	50%
Belanja Modal	16.500.000,-	16.500.000,-	100%	-	-	-	49.072.000,-	6.900.000,-	14,6 %
Jumlah	9.190.636.714,-	8.920.290.412,-	97,06 %	9.328.199.081,-	8.979.538.960,-	96,26 %	8.914.056.950,-	4.285.832.408,-	48,08 %

Sumber Data : Laporan Keuangan Kec. Tonra Tahun 2020-2022 (Semester I Tahun Berjalan)

Sebagai penjelasan tambahan terkait table tersebut diatas, data kinerja untuk evaluasi capaian kinerja setelah tersusunnya Renstra Perubahan Periode Tahun 2018-2023, dimulai dari Tahun 2021 sebagai baseline dan evaluasi capaian kinerja 3 tahun selanjutnya. Baseline data yang biasa disajikan hanya terkait dengan indicator program dan kegiatan yang diperoleh dari olahan data berdasarkan perubahan indicator kinerja sesuai Renstra Perubahan periode Tahun 2018-2023, dengan tetap memperhitungkan data capaian indicator-indikator kinerja program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, data realisasi kinerja tahun 2021 tidak termasuk dalam akumulasi pengukuran capaian kinerja Renstra Perubahan untuk periode tahun 2018-2023, dimana akumulasi pengukurannya dimulai dari tahun 2022.

Berdasarkan realisasi capaian kinerja indikator program (outcome), kegiatan (initial outcome) dan sub kegiatan (output) hingga Semester I tahun 2022, yang tersaji pada tabel II.1. di atas dan juga hasil evaluasi pelaksanaan renja triwulan 2 pada Lampiran 1, hasil evaluasi internal terhadap 5 indikator program, 11 indikator kegiatan, dan 25 indikator sub kegiatan. Pada 5 program, 11 kegiatan, dan 25 sub kegiatan sesuai Rencana Kinerja Kecamatan Tonra Kab. Bone Tahun 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Dari 25 indikator kinerja sub kegiatan (output), nilai persentase rata-rata realisasi capaian kinerja sub kegiatan hingga semester 2 tahun 2021 sebesar 96,26%, dengan rincian sebagai berikut :

- 17 Indikator Sub Kegiatan dengan nilai capaian kinerja > 70%;
- 2 Indikator Sub Kegiatan dengan nilai capaian kinerja 55- 70%;
- 0 Indikator Sub Kegiatan dengan nilai capaian kinerja < 55%;
- 6 Indikator Sub Kegiatan dengan nilai capaian kinerja = 0%.

Dari 11 indikator kinerja kegiatan (initial outcome), nilai persentase rata-rata realisasi capaian kinerja kegiatan hingga semester 2 tahun 2021 sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut :

- 8 Indikator Kegiatan dengan nilai capaian kinerja > 90%;
- 1 Indikator Kegiatan dengan nilai capaian kinerja 65- 90%;
- 1 Indikator Kegiatan dengan nilai capaian kinerja < 65%;
- 1 Indikator Kegiatan dengan nilai capaian kinerja = 0%.

Dari 5 indikator kinerja program (outcome), nilai persentase rata-rata realisasi capaian kinerja program hingga triwulan ke 2 tahun 2021 sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut :

- 4 Indikator Program dengan nilai capaian kinerja > 90%;
- 1 Indikator Program dengan nilai capaian kinerja 65- 90%;
- 0 Indikator Program dengan nilai capaian kinerja < 65%;
- 0 Indikator Program dengan nilai capaian kinerja = 0%.

Sementara serapan anggaran hingga Semester ke-2 tahun 2022, baru mencapai 48,08 % secara keseluruhan.

Predikat kinerja berdasarkan nilai realisasi capaian kinerja sub kegiatan, kegiatan, hingga program tersebut diatas, sudah terbilang tinggi, yang sebanding dengan realisasi serapan anggaran yang ada. Beberapa indikator kinerja sub kegiatan dan kegiatan yang realisasinya masih 0%, disebabkan karena waktu tahapan pelaksanaan kegiatan memang belum dimulai sesuai dengan perencanaan.

Indikator program dan kegiatan yang bersifat outcome dengan realisasi rata-rata capaian kinerjanya terlihat lebih tinggi dari realisasi rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan, dipengaruhi oleh baseline data capaian kinerja program dan kegiatan tahun sebelumnya yang dijadikan ukuran realisasi sementara, sebelum diperoleh hasil akhir tahun 2022. Bila

dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai dengan kondisi akhir yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Perubahan Tahun 2018-2023, maka kondisi realisasi capaian kinerja khususnya indikator program, sudah tinggi sejalan dengan capaian kinerja sementara hingga semester ke-2 untuk Renja 2022. Dari 5 indikator kinerja yang ada, tingkat realisasi capaiannya hingga semester ke-2 tahun 2022 cukup optimal tetapi masih perlu menjadi perhatian kedepannya untuk mendorong pencapaiannya sesuai target kinerja yang direncanakan baik target renja maupun target renstra.

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi capaian kinerja program dan kegiatan yang belum dapat mencapai target yang diharapkan, karena dipengaruhi masih adanya kegiatan yang belum terlaksana yang disebabkan kurangnya dana atau belum dicairkannya dana Kecamatan pada kegiatan tersebut.
- c. Dampak terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan yang belum dapat mencapai target yang diharapkan yaitu tidak terealisasinya beberapa program dan kegiatan sehingga realisasi capaian kinerja belum bisa optimal dan mencapai target.
- d. Kebijakan strategis dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang diperlukan agar mengoptimalkan pencapaian target kinerja outcome/output dari program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan (Rencana Kerja dan Renstra Perubahan Kecamatan Tonra Kab. Bone), khususnya program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum terpenuhi capaian kinerjanya, yaitu sebagai berikut :
 - Perencanaan dan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun berikutnya dengan indikator outcome dan output serta target kinerja dilaksanakan dengan penerapan prinsip “money follow program” yang berorientasi pada pencapaian hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tonra.
 - Peningkatan kinerja yang difokuskan pada pencapaian target kinerja outcome/output dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum optimal pelaksanaannya.
 - Melakukan Asistensi per kegiatan agar kegiatan yang belum optimal capaian kinerjanya dapat mencapai target yang diharapkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Wilayah Kecamatan Tonra terdiri dari 11 Desa serta kondisi demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan perkembangan pembangunan di Kecamatan Tonra lebih cepat di banding kecamatan lainnya sehingga menuntut pihak kecamatan untuk bisa bergerak luwes mengikuti perkembangan keadaan masyarakat baik itu dalam bidang pelayanan, ekonomi maupun sarana dan prasarana yang menunjang dalam kegiatan pendayagunaan aparatur dan masyarakat itu sendiri.

Dalam pencapaian target kinerja Tahun 2022 yang tercermin dalam program dan kegiatannya terdapat beberapa faktor yang mendukung serta kelemahan – kelemahan yang

bisa menghambat pencapaian target kinerja diantaranya adalah :

1. Faktor pendukung dalam pencapaian target kinerja diantaranya adalah :

- Struktur organisasi Kantor Camat Tonra Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.
- Situasi kantor yang kondusif sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis antar aparatur yang sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreatifitas individual maupun kelompok (Team Work).
- Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi sehingga memudahkan komunikasi dengan instansi terkait.
- Sarana dan prasarana kerja di kantor camat meskipun dengan segala keterbatasan kualitas dan kuantitas namun sangat membantu aparatur dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
- Pemberdayaan SDM yang ada dikecamatan
- Koordinasi dengan semua stakeholder baik dari pemerintah desa maupun kecamatan berjalan baik

2. Kelemahan – kelemahan yang bisa menghambat pencapaian target kinerja diantaranya :

- Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat Pemerintah Kecamatan mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
- Skill aparatur yang memegang jabatan fungsional masih rendah/minim.
- Masih adanya aparatur sipil negara yang belum bias mengoperasikan perangkat computer.
- Sarana dan prasarana kantor yang belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- Mekanisme dan pola kerja yang belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien.

Target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan Indikator kinerja pelayanan Kecamatan Tonra dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Penjelasan Tolak Ukur Indikator Tabel T-C.30

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SUMBER DATA
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tonra		Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	Persen (%)	<u>Penjelasan Target:</u> Nilai capaian target kinerja ditentukan berdasarkan hasil penilaian SAKIP. <u>Sumber Data:</u> LKjIP dan Renstra Perubahan 2018-2023
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	Persen (%)	<u>Penjelasan Target:</u> Nilai capaian target kinerja ditentukan berdasarkan hasil penilaian persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan public. <u>Sumber Data:</u> LKjIP dan Renstra Perubahan 2018-2023

Sumber Data: Renstra Perubahan 2018-2023 & LKjIP 2021

Tabel 2.4. T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan
Tonra Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi
Selatan

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	B	B	B	BB	BB	B	B	B	BB	BB	Target terpenuhi
	<p>Catatan Analisi: Hasil evaluasi oleh Inspektorat terhadap implementasi SAKIP Kecamatan yang terlaksana pada bulan Februari-Maret 2022, tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan telah mencapai predikat B. Capaian kinerja indicator ini sudah memenuhi target kinerja tahun 2021, dengan peningkatan nilai dari hasil evaluasi tahun sebelumnya. Namun demikian, masih perlu dioptimalkan untuk pencapaian target akhir jangka menengah yang ditetapkan dalam perubahan Renstra dan perubahan RPJMD Kab. Bone yaitu predikat BB (>70-80).</p> <p>Kondisi ini pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya upaya perbaikan dalam proses perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja, namun belum cukup memadai dalam proses implementasi SAKIP. Dan kelemahan ini telah diidentifikasi oleh Inspektorat dan sementara dalam proses peningkatan kualitas implementasi SAKIP melalui tahapan perubahan RPJMD dan Renstra Perubahan serta monev kinerja secara berkala.</p>											
2	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	B	B	85	90	100	100	96,26	97	99	100	Target terpenuhi
	<p>Catatan Analisi: Hasil evaluasi capaian target kinerja ditentukan berdasarkan hasil penilaian persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan public. Capaian kinerja indicator ini sudah memenuhi target kinerja tahun 2021, dengan peningkatan nilai dari hasil evaluasi tahun sebelumnya.</p> <p>Kondisi ini pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya upaya perbaikan dalam proses pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar agar target capaian kinerja dapat memenuhi target yang diharapkan.</p>											

Sumber Data: Renstra Perubahan 2018-2023 & LKjIP 2021



2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Tonra

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan disusunnya Renja sebagai sebuah rangkaian cara untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tonra bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Kecamatan Tonra untuk cukup baik terlihat dari 3 tahun capaian indikator terealisasi semuanya.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan. Permasalahan utama yang terdapat dalam pelaksanaan tugas kinerja Kecamatan adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, serta kurangnya Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dana bantuan.
3. Agar pemerintahan desa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tujuan pembangunan desa dapat tercapai maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dengan memberikan bimbingan untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, serta fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa
4. Permasalahan yang terdapat dalam pemberdayaan masyarakat adalah berkurangnya kesadaran, pengetahuan, pengalaman dan konsep diri masyarakat khususnya kader dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat. Serta kurangnya tenaga untuk sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat desa.
5. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional seperti SPM dan MDGs (Development Goals) Pencapaian visi dan misi Kecamatan Tonra sebagai penjabaran visi misi kabupaten Bone akan memberikan kontribusi yang cukup positif terhadap pencapaian visi kabupaten dan visi nasional yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat, penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal, dan perwujudan SDM aparatur yang handal
6. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakandiantaranya yaitu:
 - a. Mewujudkan ketersediaan data / informasi sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan
 - b. Mensinergikan antara perencanaan dan pelaksanaan agar dapat tercapai target indikator yang telah direncanakan

c. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintah menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan Isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi kecamatan Tonra Pada tahun 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kecamatan Tonra.

Secara Umum permasalahan dan hambatan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang maksimal;
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Kurangnya Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dana bantuan;
4. Adanya tuntutan Akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
5. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan;
6. Masih tingginya volume pelayanan masyarakat yang harus ditangani/diselesaikan
7. Kondisi masyarakat yang aman, nyaman, tertib dan kondusif harus dijaga dan ditingkatkan

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam renstra Kecamatan mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan.

Berkaitan dengan Isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi kecamatan Tonra Pada tahun 2023 tidak bisa dilepaskan dengan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan kantor Kecamatan Tonra.

Tantangan yang diperkirakan dihadapi Kecamatan Tonra selama 2023 dalam rangka pengembangan pelayanan antara lain yaitu:

1. Kepentingan

Sebagaimana diketahui dalam menentukan berbagai kebijakan sangat membutuhkan koordinasi yang intensif guna mensinkronkan berbagai kepentingan agar dapat berjalan secara harmonis. Dalam konteks tersebut kantor Kecamatan Tonra selalu berupaya untuk lebih profesional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai organisasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menampung berbagai usulan dari berbagai pihak untuk dirumuskan dan ditindaklanjuti demi mewujudkan kesejahteraan.

2. Kondisi Sosial Ekonomi Pegawai

Kondisi ekonomi pegawai juga ikut turut berpengaruh dalam menjalankan tugas dan fungsi kantor Kecamatan Tonra secara optimal, karena beban dan kebutuhan keluarga para pegawai yang semakin tinggi sedangkan sumber pendapatan hanya diharapkan dari gaji yang tetap, tentu akan berpengaruh dalam mewujudkan kualitas pelayanan terutama dalam hal disiplin kerja. Mengatasi hal tersebut, kantor Kecamatan Tonra selalu berupaya seoptimal mungkin memotivasi para personil sekaligus menerapkan pelaksanaan peraturan yang berhubungan dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku dan mengharapkan adanya perhatian serius dari pemerintah Kab. Bone untuk menambah tunjangan tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil.

Peluang yang diperkirakan dapat dimanfaatkan Kecamatan Tonra dalam rangka pengembangan pelayanan antara lain yaitu:

1. Adanya komitmen dari pimpinan daerah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengakibatkan tumbuhnya kesadaran untuk pelaksanaan pembangunan.
3. Adanya kondisi lingkungan yang menunjang kegiatan pelayanan.

4. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui bimbingan pelatihan teknis di bidang kepegawaian, pengelolaan keuangan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat dan peningkatan pendidikan aparatur melalui tugas belajar yang dibiayai oleh APBD Kab. Bone.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses review terhadap rancangan awal RKPD dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dilakukan dengan menbandingkan antara Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Hasil Analisis Kebutuhan yang diperoleh dari evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan capaian target renstra, analisis kinerja pelayanan, potensi permasalahan dan hambatan, hingga isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tonra.

Proses ini diperlukan untuk lebih mempertajam rumusan program/kegiatan beserta outcome/outputnya agar lebih berorientasi pada hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan relevan dengan perkembangan isu-isu strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tonra. Keselarasan antara dokumen perencanaan secara vertikal antara Renja Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten juga menjadi tujuan dari proses review ini, dimana proses ini dapat memberikan jaminan yang memadai terkait konsistensi perencanaan terkait perumusan program/kegiatan yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

Hal-hal yang menjadi catatan penting dari proses review ini, mencakup rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya. Perbedaan-perbedaan yang ditemukan (terkait hal-hal tersebut di atas) dalam proses ini harus dijelaskan untuk hasil perencanaan yang lebih baik, berorientasi pada pencapaian hasil yang terukur dan tepat sasaran.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2023 berdasarkan perbandingan terhadap hasil analisis kebutuhan terkait rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya, dapat dilihat pada tabel 4 (tabel T-C.31) di bawah ini.

Tabel 2.5. T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tonra

PERMENDAGRI 90

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
UNSUR KEWILAYAHAN											
KECAMATAN											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100	14.341.796.286	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100	9.074.239.290	Program Pendukung
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase realiasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	12.444.850	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase realiasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	16.056.640	Merupakan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja rutin tahunan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tonra	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1 Dokumen	732.050	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Tonra	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1 Dokumen	687,280	Meliputi dokumen Renja, PK, beserta perubahannya

	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kec. Tonra	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	732.050	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kec.Tonra	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	667,720	Waktu penyusunan sesuai tahapan penganggaran
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Tonra	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	732.050	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec.Tonra	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	748,780	Waktu penyusunan sesuai tahapan penganggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Tonra	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	732.050	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec.Tonra	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	623,100	Waktu penyusunan sesuai tahapan penganggaran
	Koordinai dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tonra	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5 Dokumen	9.516.650	Koordinai dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Tonra	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4 Laporan	13,329,760	Meliputi dokumen Laporan ikhtisar hasil pengawasan evaluasi Renja Pertriwulan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	14.099.528.511	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	8,745,808,650	Merupakan Pelayanan rutin administrasi keuangan bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tonra	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	120 Orang/ Bulan	14.099.528.511	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Tonra	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	110 Orang/ Bulan	8,745,808,650	Akumulasi dari seluruh pembayaran bulanan atas hak ASN yang meliputi gaji, dan

											tunjangan, TPP dan iuran asuransi
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	21.888.295	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	13,500,000	Merupakan pelayanan rutin administrasi kepegawaian bagi pegawai Kecamatan
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Tonra	Jumlah Paket pakaian Dinas peserta Atribut Kelengkapan (Paket)	23 Paket	21.888.295	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec.Tonra	Jumlah Paket pakaian Dinas peserta Atribut Kelengkapan (Paket)	18 paket	13,500,000	Disesuaikan dengan jumlah pegawai
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	231.693.825	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	162,382,900	Merupakan Pelayanan rutin administrasi umum penunjang aktifitas
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tonra	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2 Paket	36.719.825	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Tonra	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	28,704,030	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan perbulan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tonra	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3 Paket	87.846.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec.Tonra	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3 Paket	63,623,870	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan perbulan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Tonra	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	2 Paket	8.784.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec.Tonra	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	2 Paket	7,225,000	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan perbulan

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Kec. Tonra	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4 Dokumen	5.856.400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Kec.Tonra	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3 Dokumen	4,080,000	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan perbulan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tonra	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan	102.487.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Tonra	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan	58,750,000	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan perbulan
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		Persentase Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	147.497.790	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		Persentase Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	25,245,200	Disesuaikan dengan rencana kebutuhan pengadaan yang bersifat prioritas
	Pengadaan Mebel	Kec. Tonra	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan (unit)	15 unit	58.564.000	Pengadaan Mebel	Kec.Tonra	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan (unit)	4 Unit	6,784,000	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan mabeleuor kantor yang belum lengkap dan penggantian yang rusak
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tonra	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15 Unit	43.190.950	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Tonra	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3 Unit	18,461,200	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan peralatan/perlengkap an kantor yang masih kurang dan pengganti yang rusak untuk pelayanan administrasi perkantoran dan operasional pengawasan

	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi Perkantoran	100	70.436.840	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi Perkantoran	100	58,127,200	Merupakan jasa penunjang bagi kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tonra	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	24.083.040	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Tonra	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	19,998,400	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan perbulan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tonra	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	36.353.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Tonra	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	38,128,800	Meliputi jasa tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan supir kendaraan dinas
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		Persentase Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	165.235.398	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		Persentase Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	53,118,700	Merupakan pelayanan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah secara rutin dan berkala sesuai rencana kebutuhan

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tonra	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6 Unit	71.740.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tonra	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4 Unit	40,300,000	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan dan pembayaran pajak tahunan kendaraan dinas sesuai rencana kebutuhan pertriwulan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tonra	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12 unit	7.320.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tonra	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8 Unit	4,790,000	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan sesuai rencana kebutuhan
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tonra	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2 unit	86.173.998	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tonra	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2 Unit	8,028,700	Berupa paket pekerjaan pemeliharaan/ perbaikan interior ruangan gedung kantor
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	22.097.661	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	19,681,930	Program Pendukung
	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>		Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100	22.097.661	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>		Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100	19,681,930	Merupakan kegiatan penunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan

	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tonra	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1 Laporan	22.097.661	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec.Tonra	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1 Laporan	19,681,930	Merupakan Laporan Hasil koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	58.564.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	39,425,430	Program Pendukung
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>		Presentase Peningkatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	58.564.000	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>		Presentase Peningkatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	39,425,430	Merupakan dokumen pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tonra	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1 Laporan	58.564.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Tonra	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1 Laporan	39,425,430	Merupakan Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)	100	39.530.700	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	100	27,000,000	Program Pendukung
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>		Persentase Peningkatan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	39.530.700	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>		Persentase Peningkatan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	27,000,000	Merupakan laporan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tonra	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	36 Laporan	39.530.700	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Tonra	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	36 Laporan	27,000,000	Merupakan Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5	ROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa (%)	100	11.712.800	ROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa	100	13,500,000	Program Pendukung

	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>		Persentase Peningkatan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	18.712.800	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>		Persentase Peningkatan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	13,500,000	Merupakan Laporan Periodik Hasil Pengawasan terhadap Program dan Kegiatan Desa
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Tonra	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	11 Laporan	14.320.500	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec.Tonra	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	11 Laporan	13,500,000	Merupakan laporan Koordinasi Pendampingan Desa

Sumber Data: Renstra Perubahan 2018-2023 & SIPD

Secara umum, hasil analisis kebutuhan terhadap rencana program dan kegiatan Kecamatan Tonra dalam Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2023 mengalami perubahan ataupun penyesuaian baik dari segi jumlah, indicator dan target kinerja serta pagu anggaran yang direncanakan.

Demikian pula penetapan rumusan indicator kinerja outcome dan output dari program dan kegiatan yang dilakukan telah diupayakan berorientasi hasil dan memenuhi kriteria indicator yang baik dengan target kinerja tahunan dan pagu indikatif yang disesuaikan analisa kebutuhan berdasarkan hasil kajian evaluasi kinerja tahun sebelumnya hingga tahun berjalan serta perkembangan isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tonra.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

- 1) Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas di dalam Musrenbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbangdes.
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Pemerintah Kecamatan Tonra dalam pelaksanaan pembangunan menggunakan suatu model yang disebut *Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP)* yang bermakna bahwa ide pembangunan tidak dari pemerintah kepada masyarakat (Top Down) tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan - usulan pembangunan kepada Pemerintah (Bottom Up) dalam wadah kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa / Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka menjamin keselarasan arah dan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran prioritas pembangunan nasional, maka setiap tahunnya ditetapkan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022, dengan tema RKP Tahun 2023 secara nasional yaitu ***"Peningkatan Produktifitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"***, dengan focus pembangunan diarahkan pada *Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan; Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job; Mendorong pemulihan dunia usaha; Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; Pembangunan rendah karbon dan transisi energy (respon terhadap perubahan iklim); Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara*, dengan sasaran yang harus dicapai pada Tahun 2023 antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 % - 5,9 %;
2. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3 % - 6,0 %;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 7,0 % - 8,0 %;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29 – 73,35;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 % - 8,0 %;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103 – 105; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105 – 107.

Untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tema RKP Tahun 2023 : ***"Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkarakter"***, dengan target indikator makro pembangunan Tahun 2023 yaitu :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,71 % - 6,18 %;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 6,28 %;
3. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,05
4. Rasio Gini sebesar 0,381
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,26 %.

Sesuai arahan Presiden, sasaran dan prioritas pembangunan nasional Tahun

2023 sebagai berikut :

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan Undang-undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, yakni :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kebijakan-kebijakan nasional tersebut diatas menjadi rujukan bagi setiap pemerintah daerah, termasuk setiap perangkat daerah dalam merumuskan prioritas tujuan dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Tahun 2023.

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan selaku penyelenggara urusan pemerintahan umum yang berada pada urusan penunjang kewilayahan, tidak diatur secara khusus arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah. Namun pada prinsipnya, tetap memiliki peran penting sekaligus kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah agar berjalan dengan tata kelola yang baik dan selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan prioritas pembangunan nasional.

Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berperan dalam mendorong pencapaian misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Bone, memiliki 4 (empat) Program Prioritas yaitu: “Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi dan Ketertiban Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa”. Sementara 1 (satu) program lainnya merupakan program penunjang terkait pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana, peningkatan disiplin dan kompetensi aparatur, perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja yang diarahkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Tahun 2023.

3.2 Tujuan Dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan

Sebagaimana telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bone terpilih tentang visi dan misi serta program strategis yang akan dilakukan selama masa pemerintahan lima (5) tahun kedepan yang tertuang dalam RPJMD Perubahan kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 dan menjadi pedoman dan arah bagi penetapan tujuan dan sasaran setiap perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone sebagaimana telah dijabarkan kedalam Renstra Perubahan setiap perangkat daerah termasuk Kecamatan Tonra

Visi Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 :

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Visi tersebut diatas kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam misi, strategi hingga arah kebijakan yang menjadi tema pembangunan dalam RKPD setiap tahunnya. Adapun Tema Pembangunan dalam RKPD Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2023 yang telah diselaraskan dengan tema RKP Nasional dan RKPD Pemerintah Provinsi, yakni :

“Transformasi Pemulihan Ekonomi melalui

Penguatan Infrastruktur Dasar dan Sosial Masyarakat”

Sedangkan **Misi** pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2018 -2023 yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tonra adalah :

**“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)”**

Adapun Rumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Tonra Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

Tujuan : *Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tonra*

Sasaran : *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*

Indikator kinerja (dampak) beserta target kinerja dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka pendek pada Tahun 2023, termasuk rencana program/kegiatan terkait, dapat dilihat pada table berikut ini :

3.3 Program Dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam jangka pendek pada Tahun 2023 lebih lanjut dijabarkan sesuai tugas dan fungsi yang ada termasuk rencana program/kegiatan terkait, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah beserta Program dan Kegiatan Tahun 2023 – Kecamatan Tonra Kab. Bone

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET TUJUAN TAHUN 2024	TARGET SASARAN TAHUN 2023	PROGRAM & KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tonra		Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	BB (>90-100)	BB (>90-100)			
	Meningkatkan kualitas pelayanan public	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	100%	100%	Ø PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	9,074,239,290	Dana Alokasi Umum
					* Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,056,640	
					* Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,745,808,650	
					* Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13,500,000	
					* Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	162,382,900	
					* Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25,245,200	
					* Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58,127,200	
					* Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53,118,700	
				Terdiri dari 19 Sub Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada bab IV			



				<p>Ø PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</p> <p>* Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan</p> <p><i>Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada bab IV</i></p>	<p>19,681,930</p> <p>19,681,930</p>	Dana Alokasi Umum
				<p>Ø PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</p> <p>* Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p> <p><i>Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada bab IV</i></p>	<p>39,425,430</p> <p>39,425,430</p>	Dana Alokasi Umum
				<p>Ø PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</p> <p>* Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum</p> <p><i>Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada bab IV</i></p>	<p>27,000,000</p> <p>27,000,000</p>	Dana Alokasi Umum
				<p>Ø PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</p> <p>* Kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</p> <p><i>Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada bab IV</i></p>	<p>13,500,000</p> <p>13,500,000</p>	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber : Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 & Renja 2023



Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka pendek dan menengah berdasarkan Renstra Perubahan Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 serta hasil kajian terhadap isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, ditetapkanlah program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai target kinerja tujuan/sasaran strategis setiap tahunnya.

Disamping untuk mendorong pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, dalam perencanaan kinerja Tahun 2023, pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan umum oleh kecamatan juga diarahkan untuk mendorong pencapaian target sasaran pembangunan nasional yang terkait Pencapaian SDGs, Pencapaian NSPK dan SPM, dan sebagainya, berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kab. Bone, termasuk Pemerintah Desa. Hal-hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Tonra Kabupaten Bone.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tahun 2023, direncanakan terdiri dari 5 Program, 11 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan yang kesemuanya difokuskan pada pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TONRA

Berdasarkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Kecamatan Tonra tahun 2023, maka perlu direncanakan sumber dana program dan kegiatan yang dasarnya terdiri dari program dan kegiatan utama, yang merupakan program dan kegiatan yang memiliki indikator dan target kinerja utama dalam pencapaian sasaran strategis yang akan dicapai setiap tahunnya untuk mewujudkan tujuan jangka menengah, program dan kegiatan pendukung merupakan program dan kegiatan rutin yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan utama perangkatdaerah yang direncanakan dan sasaran yang ingin dicapai dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Secara lengkap, rumusan rincian rencana program dan kegiatan Kecamatan Tonra tahun 2023 yang sumber penganggarnya sebagian besar bersumber dari DAU-APBD Kab. Bone, maka dalam rangka penerapan PMDN No. 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri No. 050-5889 tahun 2021 guna pengintegrasian dan penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, serta penerapan e-government terintegrasi, maka proses perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) yang disediakan oleh Kepmendagri. Hasil penginputan Renja Kecamatan Tonra melalui aplikasi SIPD ini secara lengkap dapat dilihat pada tableTabel-C.33 berikut ini:

Tabel 4.1. T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tonra

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01				KECAMATAN				9,173,846,650				15,959,960,400
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Kantor Camat Tonra	100	9,074,239,290	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	15,821,676,000
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>persentase realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	Kantor Camat Tonra	100	16.056.640	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	18,800,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Camat Tonra	1 Dokumen	687,280	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	950,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor Camat Tonra	1 Dokumen	667,720	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	950,000



7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kantor Camat Tonra	1 Dokumen	748,780	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	950,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kantor Camat Tonra	1 Dokumen	623,100	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	950,000
7	01	01	2.01	06	Koordinai dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Camat Tonra	4 Laporan	13,329,760	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	15,000,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kantor Camat Tonra	100	8,745,808,650	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	15,199,530,000
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Kantor Camat Tonra	110 Orang/bulan	8,745,808,650	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	15,199,530,000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kantor Camat Tonra	100	13,500,000	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	21,890,000
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian Dinas peserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Kantor Camat Tonra	18 Paket	13,500,000	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	21,890,000

7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kantor Camat Tonra	100	162,382,900	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	235,102,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kantor Camat Tonra	1 Paket	28,704,030	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	28,720,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kantor Camat Tonra	3 Paket	63,623,870	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	88,850,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	Kantor Camat Tonra	2 Paket	7,225,000	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	8,985,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Kantor Camat Tonra	3 Dokumen	4,080,000	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	5,960,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kantor Camat Tonra	12 Laporan	58,750,000	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	102,587,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kantor Camat Tonra	100	25,245,200	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	103,754,000
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan (unit)	Kantor Camat Tonra	4 Unit	6,784,000	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	58,564,000

7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Kantor Camat Tonra	3 Unit	18,461,200	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	45,190,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi Perkantoran	Kantor Camat Tonra	100	58,127,200	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	73,685,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan (Laporan)	Kantor Camat Tonra	12 Laporan	19,998,400	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	24,185,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kantor Camat Tonra	12 Laporan	38,128,800	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	49,500,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kantor Camat Tonra	100	53,118,700	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	168,915,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Kantor Camat Tonra	4 Unit	40,300,000	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	71,950,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Kantor Camat Tonra	8 Unit	4,790,000	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	8,815,000

7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Kantor Camat Tonra	2 Unit	8,028,700	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	88,150,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Tonra	100	19,681,930	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	23,100,000
7	01	02	2.01		<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan</i>	<i>Kantor Camat Tonra</i>	<i>100</i>	<i>19,681,930</i>	<i>Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		<i>100 Persen</i>	<i>23,100,000</i>
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	Kantor Camat Tonra	1 Laporan	19,681,930	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	23,100,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kantor Camat Tonra	100	39,425,430	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	58,600,000
7	01	03	2.01		<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Presentase Peningkatan Program Pemberdayaan Masyarakat</i>	<i>Kantor Camat Tonra</i>	<i>100</i>	<i>39,425,430</i>	<i>Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		<i>100 Persen</i>	<i>58,600,000</i>
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Tonra	1 Laporan	39,425,430	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	58,600,000

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	Kantor Camat Tonra	100	27,000,000	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	41,584,400
7	01	04	2.01		<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Presentase Peningkatan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Kantor Camat Tonra</i>	<i>100</i>	<i>27,000,000</i>	<i>Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>		<i>100 Persen</i>	<i>41,584,400</i>
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Tonra	36 Laporan	27,000,000	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	41,584,400
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Dana Desa	Kantor Camat Tonra	100	13,500,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Persen	15,000,000
7	01	06	2.01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Presentase Peningkatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</i>	<i>Kantor Camat Tonra</i>	<i>100</i>	<i>13,500,000</i>	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>		<i>100 Persen</i>	<i>15,000,000</i>
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kantor Camat Tonra	11 Laporan	13,500,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Persen	15,000,000


Sumber Data: Tabel RENJA Tahun 2023

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan dan Pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Tonra sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Bone akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bone. Rencana Kerja 2023 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan merupakan komitmen dari Pimpinan, Kepala Seksi dan seluruh staff demi terwujudnya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2023, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Demikian Penyusunan Rencana Kerja (Renja) disusun untuk memberi gambaran tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.

Bulu-Bulu, 30 Juli 2022
CAMAT TONRA

ANDI SUPRIADI, SH
Pangkat : Pembina
NIP. 19731030 200604 1 009

LAMPIRAN 1
CASCADING KINERJA RENJA KECAMATANTONRA
KABUPATEN BONE
TAHUN 2023



CASCADING KINERJA RENJA TAHUN 2023 – KECAMATAN TONRA

VISI-RPJMD KAB. BONE 2018-2023		
Masyarakat Kab. Bone Yang MaBeSsa (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)		
MISI-RPJMD KAB. BONE 2018-2023		
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)		
TUJUAN KECAMATAN		
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tonra		
SASARAN		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		
INDIKATOR		
Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan		Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip



PROGRAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PROGRAM	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa
	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%
ANGGARAN	9,074,239,290	19,681,930	39,425,430	27,000,000	13,500,000
UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	SEKRETARIS	SEKSI PELAYANAN UMUM	SEKSI PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, SEKSI PEREKONOMIAN DAN KESRA	SEKSI TRANTIBUM	SEKSI PEMERINTAHAN



KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA KEFIATAN	persentase realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Presentase Peningkatan Program Pemberdayaan Masyarakat	Presentase Peningkatan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Peningkatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%
ANGGARAN	16.056.640	8,745,808,650	13,500,000	162,382,900	25,245,200	58,127,200	53,118,700	19,681,930	39,425,430	27,000,000	13,500,000
UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	Sekretaris dan Sub Bagian Program dan Keuangan	Sub Bagian Program dan Keuangan	Seksi Pelayanan Umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Seksi Pelayanan Umum	Sub Bagian Program dan Keuangan	Seksi Pelayanan Umum	Seksi, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan	Seksi Trantibum	Seksi Perekonomian PAD dan Kesra



KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
SUB KEGIATAN 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Mebel	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Jumlah Paket pakaian Dinas peserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan (unit)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%
ANGGARAN	687,280	8,745,808,650	13,500,000	28,704,030	6,784,000	19,998,400	40,300,000	19,681,930	39,425,430	27,000,000	13,500,000



SUB KEGIATAN 2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA KEFIATAN	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				
	Target Kinerja: 100%			Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%				
ANGGARAN	667,720			63,623,870	18,461,200	38,128,800	4,790,000				
SUB KEGIATAN 3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA KEFIATAN	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang disediakan (Paket)			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)				
	Target Kinerja: 100%			Target Kinerja: 100%			Target Kinerja: 100%				
ANGGARAN	748,780			7,225,000			8,028,700				



SUB KEGIATAN 4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan							
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA KEFIATAN	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)							
	Target Kinerja: 100%			Target Kinerja: 100%							
ANGGARAN	623,100			4,080,000							
SUB KEGIATAN 5	Koordinai dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA KEFIATAN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)							



	Target Kinerja: 100%			Target Kinerja: 100%							
ANGGARAN	13,329,760			58,750,000							
UNIT KERJA PENANGGUN G JAWAB PROGRAM	Sekretaris dan Sub Bagian Program dan Keuangan	Sub Bagian Program dan Keuangan	Seksi Pelayanan Umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Seksi Pelayanan Umum	Sub Bagian Program dan Keuangan	Seksi Pelayanan Umum	Seksi, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan	Seksi Trantibum	Seksi Perekonomia n PAD dan Kesra



LAMPIRAN 2

RUMUSAN PROGRAM & KEGIATAN DAN PENDANAAN RENJA KECAMATAN TONRA TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024 (CETAKAN SIPD)



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Tonra
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Tonra

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								9,173,846,650	15,959,960,400				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								9,074,239,290	15,821,676,000				
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								16,056,640	18,800,000				
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Persentase realiasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerjadan keuangan	Kab. Bone, Tonra, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	687,280	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	950,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan DokumenRKA- SKPD	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase realiasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerjadan keuangan	Kab. Bone, Tonra, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	667,720	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	950,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Persentase realiasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerjadan keuangan	Kab. Bone, Tonra, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	748,780	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	950,000

7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan PerubahanDPA-SKPD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase realiasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerjajadan keuangan	Kab. Bone, Tonra, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	623,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	950,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase realiasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerjajadan keuangan	Kab. Bone, Tonra, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Laporan	100 persen	13,329,760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	15,000,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								8,745,808,650				15,199,530,000	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Bone, Tonra, Semua Kelurahan	100 Persen	110 Orang/b	100 Persen	8,745,808,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	15,199,530,000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								13,500,000				21,890,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Bone, Tonra, Semua Kelurahan	100 Persen	18 Paket	100 persen	13,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	21,890,000



7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								162,382,900					235,102,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Bone, Tonra, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	100 persen	28,704,030	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	28,720,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Bone, Tonra, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Paket	100 persen	63,623,870	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	88,850,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Bone, Tonra, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Paket	100 persen	7,225,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	8,985,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Bone, Tonra, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Dokumen	100 persen	4,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	5,960,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Bone, Tonra, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 persen	58,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat	100 Persen	102,587,000



																	Daerah		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								25,245,200						103,754,000
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bone, Tonra, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Unit	100 persen	6,784,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	58,564,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bone, Tonra, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Unit	100 persen	18,461,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	45,190,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								58,127,200						73,685,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Bone, Tonra, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 persen	19,998,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	24,185,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Bone, Tonra, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 persen	38,128,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	49,500,000



7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								53,118,700					168,915,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bone, Tonra, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Unit	100 Persen	40,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	71,950,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bone, Tonra, Semua Kelurahan	100 Persen	8 Unit	100 Persen	4,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	8,815,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bone, Tonra, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Unit	100 Persen	8,028,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	88,150,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								19,681,930					23,100,000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								19,681,930					23,100,000
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Kab. Bone, Tonra, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 persen	19,681,930	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	23,100,000



7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								39,425,430					58,600,000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								39,425,430					58,600,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan MasyarakatDesa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase Peningkatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kab. Bone, Tonra, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 persen	39,425,430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	58,600,000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								27,000,000					41,584,400
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								27,000,000					41,584,400
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bone, Tonra, Semua Kelurahan	100 Persen	36 Laporan	100 Persen	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	100 Persen	41,584,400
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								13,500,000					15,000,000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								13,500,000					15,000,000
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya	Persentase Peningkatan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Bone, Tonra, Semua Kelurahan	100 persen	11 Laporan	100 persen	13,500,000	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa	100 persen	15,000,000
TOTAL													9,173,846,650					15,959,960,400

